

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News

Wilayah: Kabupaten Semarang

Ingin Pertahankan Opini WTP, Mundjirin Minta Bawahannya Tidak Korupsi Uang Rakyat

<https://jateng.tribunnews.com/2020/01/14/ingin-pertahankan-opini-wtp-mundjirin-minta-bawahannya-tidak-korupsi-uang-rakyat>

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bupati Semarang Mundjirin meminta semua kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tak mempraktikkan perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Artinya para kepala SKPD harus bekerja dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

"Jangan pernah korupsi uang rakyat," paparnya, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan salah satu bentuk SKPD bekerja dengan baik ialah tak melaksanakan kegiatan pembangunan dibiayai APBD Kabupaten Semarang secara akuntabel serta transparan.

Bupati Mundjirin menilai, sejak tahun anggaran 2011 pihaknya telah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.

"Hal tersebut tentunya harus dipertahankan, karena menjadi bagian dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik," katanya.

Ia mengatakan struktur APBD tahun 2020 di Kabupaten Semarang, di antaranya pendapatan sebesar Rp2,362 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp479,87 miliar, dana perimbangan Rp1,3 triliun, juga pendapatan daerah yang sah Rp487,6 miliar.

Sedangkan ia menjelaskan, untuk pos belanja langsung dan tak langsung sebesar Rp2,4 triliun.

Sementara, pos pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp94,9 miliar, pengeluaran Rp2,78 miliar, serta pembiayaan netto Rp92,14 miliar.

"Dengan struktur seperti itu, kepala SKPD dan jajarannya musti bisa melaksanakan kegiatan sesuai peruntukannya dan prinsip keuangan efisien," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Abdullah Masykur menambahkan, APBD Kabupaten Semarang telah ditetapkan akhir tahun lalu.

"Penyediaan pelaksanaan APBD dalam bentuk uang persediaan direalisasikan sejak 3 Januari 2020," paparnya. (Ahm)